



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 20 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 15**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa Hari Jadi Kabupaten Kendal merupakan sandaran dari sejarah sehingga dapat menjadi sumber aspirasi, inspirasi dan motivasi dalam

rangka memajukan daerah, sehingga perlu menetapkan momentum yang lebih tepat berdasarkan fakta sejarah dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Kendal;

- b. bahwa Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1989 Seri D No. 5), didasarkan pada kajian sejarah penyerangan Tumenggung Bahurekso ke Batavia yang lebih mengedepankan aspek heroik semata dari pada mengindahkan kronologi fakta sejarah yang oleh berbagai pengamatan hal tersebut tidak tepat apabila dijadikan momentum hari jadi, sehingga untuk lebih mengungkap fakta sejarah secara lebih komprehensif, maka telah diadakan kajian ulang melalui Seminar Hari Jadi Kabupaten Kendal yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2006 di Pendopo Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan hasil Seminar sebagaimana dimaksud huruf b di atas dan kesimpulan Tim Perumus Peninjauan Kembali Hari Jadi Kabupaten Kendal, disimpulkan bahwa Hari

Jadi Kabupaten Kendal ditetapkan bertepatan dengan momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal yang jatuh pada tanggal 28 Juli 1605 M, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1989 Seri D No. 5) sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hari Jadi Kabupaten Kendal.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indo-

nesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 27 Juli 1968 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 135 Seri C Tahun 1970).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG HARI JADI KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Hari Jadi adalah tanggal, bulan dan tahun pada saat Tumenggung Bahurekso diangkat sebagai Bupati Kendal yang bertepatan dengan tanggal 28 Juli 1605 M;
5. Sesanti adalah kalimat / ungkapan filosofis yang berkaitan dengan sejarah Hari Jadi Kabupaten Kendal.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Kendal ditetapkan pada tanggal pengangkatan Tumenggung Bahurekso sebagai Bupati Kendal yang bertepatan dengan Upacara Garebeg Maulud Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal (12 Maulud) tahun 1014 H (tanggal dua belas bulan Rabiul Awal tahun seribu empat belas Hijriah).

- (2) Pengangkatan Tumenggung Bahurekso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonversi menjadi tanggal 28 Juli 1605 M (tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun seribu enam ratus lima Masehi) bertepatan pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing Tahun 1527 Caka.

Pasal 3

Sejarah pengangkatan Tumenggung Bahurekso sebagai Bupati Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Buku Kajian Sejarah Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SESANTI

Pasal 4

- (1) Tahun 1605 Masehi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diwujudkan dengan surya sengkala (Tahun Masehi) sebagai berikut :

Makna dalam Angka :

- a. Sangsaya : 5 (lima);
- b. Kumbul : 0 (nol);

c. Manising : 6 (enam);

d. Bumi : 1 (siji).

- (2) Keseluruhan surya sengkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tahun 1605 (seribu enam ratus lima) Masehi.

BAB IV

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Apabila dikemudian hari ditemukan fakta atau bukti baru sejarah atau pendukung baru yang otentik tentang hari jadi Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan

diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1989 Seri D No. 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO



andangkan di Kendal
la Tanggal 22 Desember 2006

An. BUPATI KENDAL
h. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Dinas P dan K

Cap ttd

MULYADI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 586 118

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006
NOMOR : 20 SERI : E NO. : 15

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Hari Jadi Kabupaten Kendal merupakan sandaran dari sejarah sehingga dapat menjadi sumber aspirasi, inspirasi dan motivasi dalam rangka memajukan daerah, sehingga perlu menetapkan momentum yang lebih tepat berdasarkan fakta sejarah dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Kendal. Disamping itu, Hari Jadi suatu daerah dapat dimaknai sebagai hari yang dipandang menentukan dalam sejarah perkembangan daerah tersebut dimasa lampau.

Hari yang menentukan tersebut antara lain bisa berupa saat terbentuknya suatu daerah administratif, heroisme tokoh, dan sebagainya. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan untuk menentukan hari jadi, yaitu : (1) mencerminkan citra keberadaan suatu daerah (kabupaten atau Kota); (2) memiliki nilai kebanggaan terhadap bangsa Indonesia (termasuk daerah kota atau kabupatennya); (3) memiliki nilai edukatif; (4) dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis khususnya metode sejarah;

(5) dapat diterima masyarakat pendukungnya; dan (6) merupakan berita tertua.

Penentuan hari jadi ditentukan oleh dua hal, yaitu penelitian ilmiah kesejarahan dan keinginan masyarakat pendukungnya. Penelitian ilmiah kesejarahan artinya bahwa momen yang dijadikan hari jadi benar-benar peristiwa sejarah, yang didasarkan pada hasil riset akademik di bidang sejarah. Sementara itu yang dimaksud dengan keinginan masyarakat pendukungnya adalah momen sejarah yang dipilih tersebut benar-benar diinginkan sebagai simbol dan citra keberadaan daerah tersebut.

Momen kesejarahan dari suatu daerah suatu ketika dapat berubah. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu temuan baru fakta-fakta sejarah dan perubahan sosial dan politik daerah tertentu yang menghendaki perubahan. Kecenderungan ini secara ilmiah dapat diterima karena karya sejarah merupakan produk zamannya, sehingga setiap generasi dapat memilih momen sejarahnya tersendiri sebagai simbol atau citra daerahnya.

Kabupaten Kendal pada saat ini hendak mengganti momentum hari jadi yang semula didasarkan pada penyerangan pasukan Bahurekso terhadap markas VOC di Batavia pada tanggal 28 Agustus 1628 dengan momen pengangkatan Bahurekso menjadi Bupati atau Kepala Daerah Kendal. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan efek psikologis, yakni kegagalan tokoh dalam peperangan yang berakibat wafatnya tokoh tersebut di Batavia. Selain itu secara rasional peristiwa heroik tersebut kurang tepat jika dijadikan sebagai pertanda awal mula munculnya Kabupaten Kendal. Yang lebih tepat hari jadi Kabupaten memang momen ketika Bahurekso diangkat sebagai

Bupati atau Kepala Daerah Kendal.

Hasil seminar yang diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2006 dengan pembicara Prof. Dr. Djulianti Soeroyo, Dr. Wasino, M. Hum., dan H. Moenadi menyepakati bahwa momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal sebagai Hari Jadi Kabupaten Kendal. Para pembicara juga sepakat bahwa pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal mengikuti tradisi pengangkatan pejabat tinggi Kerajaan Mataram Islam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi mereka belum menyepakati tahun pengangkatannya. Untuk menindaklanjuti kegiatan seminar tersebut dibentuklah tim perumus yang terdiri dari para pembicara, moderator, anggota DPRD, dan Pejabat Kabupaten Kendal. Salah satu saran yang diajukan adalah perlunya penelitian lebih mendalam di Jakarta dan Yogyakarta untuk memastikan tahun terjadinya pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal.

Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam melalui penelitian sumber-sumber dari Belanda serta Babad di Jakarta dan Jogjakarta oleh *Tim Perumus* Peninjauan Kembali Momentum Peristiwa Sejarah Perjalanan Hidup Tumenggung Bahurekso sebagai Titik Tolak Penentuan Hari Jadi Kabupaten Kendal menyimpulkan bahwa pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal adalah tanggal 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605 M. Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari *Kamis Legi* malam Jumat Pahing tahun 1527 Caka.

Berdasarkan hasil Seminar sebagaimana tersebut di atas dan kesimpulan *Tim Perumus* Peninjauan Kembali Hari Jadi Kabupaten Kendal, bahwa Hari Jadi Kabupaten Kendal ditetapkan bertepatan dengan momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal

yang jatuh pada tanggal 28 Juli 1605 M, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1989 Seri D No. 5) sudah tidak sesuai dengan fakta sejarah dan perlu diganti.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hari Jadi Kabupaten Kendal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

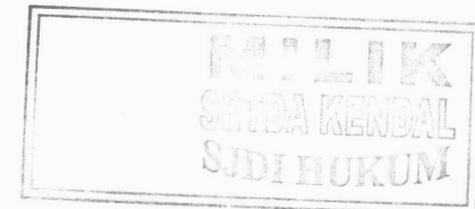
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor : 20 Tahun 2006
Tanggal : 21 Desember 2006



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUKU

**KAJIAN SEJARAH
PENGANGKATAN TUMENGGUNG BAHUREKSO
SEBAGAI BUPATI KENDAL
YANG DIJADIKAN MOMENTUM
HARI JADI KABUPATEN KENDAL**



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor : 20 Tahun 2006
Tanggal : 21 Desember 2006

**KAJIAN SEJARAH
PENGANGKATAN TUMENGGUNG BAHUREKSO
SEBAGAI BUPATI KENDAL**

1. Hari Jadi Kabupaten Kendal, sebuah Peninjauan Ulang.

Seperti diketahui Hari Jadi Kabupaten Kendal, dahulu bernama Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, telah ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 1628 (Sabtu Wage 25 Besar 1037 Anno Hijriah atau 1549 / Anno Jawa Tahun Jimawal Windu Kuncara Mangsa Ketiga). Ini merupakan hasil penelitian dari Panitia Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, telah diseminarkan pada tanggal 15 Pebruari 1989. Juga telah diundangkan dalam Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 5).

Bahwa ketetapan Hari Jadi tersebut dipandang kurang memberikan inspirasi dan aspirasi serta motivasi warga untuk memajukan daerahnya, juga dikhawatirkan membawa efek psikologis yang kurang positif. Alasan utama adalah karena tonggak waktu untuk Hari Jadi mengangkat peristiwa penyerangan besar-besaran Kerajaan Mataram ke Batavia untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Jawa / Nusantara. Namun sayang berakhir dengan kekalahan Mataram dan gugurnya sang pahlawan : Tumenggung Bahurekso, panglima dan laksamana Mataram adalah Bupati Kendal.

Upaya peninjauan ulang ini sangat dihargai, karena hal ini menunjukkan sikap keterbukaan Pemda Kendal, sebuah otokritik bahwa segala sesuatu yang telah diputuskan dan dilaksanakan mungkin benar pada situasi, kondisi, serta masa tertentu, tetapi dapat pula kurang benar pada situasi dan kondisi yang lain. Demi kemaslahatan masyarakat yang lebih besar, selalu dapat dilakukan berbagai koreksi, revisi, atau penyempurnaan terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah.

Tujuan Hari Jadi Daerah.

Tujuan mencari Hari Jadi suatu daerah tentulah bukan sekedar sebuah keingintahuan yang semata-mata mengingat masa lalu. Kiranya ada beberapa alasan bisa dikemukakan.

Pertama, untuk mencari identitas, corak khas dari daerah dan masyarakatnya, keunikan-keunikan yang memiliki nilai-nilai, yang menjadikan kebanggaan warganya, di manapun ia berada.

Kedua, identitas yang menjadi milik bersama yang mengikat solidaritas warga untuk mencintai daerahnya, membelanya dalam suka dan duka.

Ketiga, menjadi inspirasi, motivasi, dan semangat untuk memajukan masyarakat dan daerahnya menuju kehidupan yang lebih indah dan sejahtera.

Momentum peringatan Hari Jadi sebuah daerah dapat digunakan untuk menghidupkan kebersamaan masyarakat sederhana. Disamping bergembira bersama, juga bisa untuk meningkatkan semangat

kompetitif dalam menghasilkan produk-produk unggulan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya (pendidikan, kerajinan, kesenian, kehidupan beragama dan lain-lain), baik antar lokalitas, antar lembaga, atau antar kelompok masyarakat. Tentunya menjadi sebuah start awal yang berkelanjutan.

Seperti telah dikemukakan di atas, tampaknya pilihan Hari Jadi yang ada sekarang kurang kondusif untuk menggugah semangat warga, hanya karena penyerbuan Mataram ke Batavia justru berakhir dengan kegagalan dan gugurnya sang pahlawan. Sesungguhnya bila ditinjau dari semangat juang, keberanian dan pengorbanan Tumenggung Bahurekso sangat patut menjadi teladan warga.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pada dasarnya mencari Hari Jadi suatu daerah adalah mencari masa awal berdirinya sebuah pemerintahan resmi, dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Kendal.

Kedua, dapat pula dicari tokoh pendiri / pembuka suatu daerah (desa, kabupaten, kota, kerajaan) dan bilamana ia mulai membangunnya.

Ketiga, karena peristiwa masa lalu tidak mungkin diulang, maka kebenaran sejarah hanya dapat diketahui melalui jejak-jejak yang terekam melalui ingatan dan catatan (*records*). Oleh sebab itu diperlukan sebanyak mungkin catatan / informasi. Semakin dekat dengan peristiwanya semakin baik.

Satu sumber yang kami dapatkan dan sangat menarik adalah buku *Babad Tanah Kendal* karya Ahmad Hamam Rochani (2003). Buku ini menggunakan sumber sejarah yang cukup banyak merujuk kepada berbagai informasi mengenai daerah Kendal sejak awal mula ditemukan catatan/tulisan tentang daerah ini. Buku ini merupakan sejarah lokal yang menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan “nasional” ke “lokal”, dan pendekatan “lokal” ke “nasional”. Artinya penulisannya diawali dari *babon* sejarah tradisional Jawa, yaitu *Babad Tanah Jawi*, dan *Babad* tentang kerajaan-kerajaan besar seperti *Babad Sultan Agung*, *Babad Pajang*, *Babad Cirebon*, memuat berbagai tokoh “nasional” yang membangun jaringan kekuasaan dengan tokoh-tokoh lokal. Sebaliknya melalui tradisi-tradisi tutur, tradisi lisan dan *babad* lokal ditampilkan tokoh-tokoh lokal yang juga membina jaringan kekuasaan dengan tokoh tingkat “nasional”. Di sini tampak bahwa sejarah lokal selalu berkaitan dengan sejarah nasional meskipun ia tetap memiliki otonomi. Sebaliknya sejarah makro atau “nasional” dengan sepak terjang kebijakan politiknya berimbas pula di tingkat lokal.

Kembali kepada kajian ulang tentang Hari Jadi Kabupaten Kendal, ada tiga unsur pokok yang perlu dianalisis, yaitu tokoh penguasa Kendal, lokasi ibukota Kendal, dan kapan awal pemerintahan Kabupaten Kendal.

Pertama, tentang tokoh penguasa Kabupaten Kendal yang pertama. Dari tulisan A. Hamam Rochani, terdapat empat tokoh utama yang dianggap sebagai “pendiri” atau “pembuka” daerah Kendal :

1. Sunan Katong, mantan bupati Ponorogo yang menyebarkan agama Islam dan dimakamkan di Kaliwungu.
2. Pangeran Benowo, Putera Sultan Pajang Hadiwijoyo yang meninggalkan takhta Pajang dan tinggal di daerah Kendal.
3. Pangeran Kendal atau Sunan Kedaton, tidak begitu dikenal selain dalam Babad Cirebon.
4. Ki Bahu, kemudian dikenal sebagai Tumenggung Bahurekso, penguasa daerah Kendal, sebuah kabupaten pesisiran bawahan kerajaan Mataram.

Dari ke empat tokoh utama Tumenggung Bahurekso tampaknya paling jelas sebagai bupati Kendal pertama, ketika Kendal jelas telah menjadi daerah Mataram. Bahurekso juga menjadi panglima balatentara Mataram dalam berbagai ekspedisi penaklukan Mataram (Surabaya, Madura, Sukadana, Kalimantan Selatan dan Batavia) dan sebagai Laksamana armada Mataram. Ia dikenal Belanda sebagai gubernur Jepara (de Graff, 1990 : 24, 28, 7.1). Ia juga merupakan tokoh lokal yang melejit menjadi tokoh “nasional” namun tetap berdomisili di Kendal (A. Hamam Rochani, 2003 : 252-259).

Beberapa catatan perlu dikritisi mengenai Bahurekso :

- a. Dalam *Babad Tanah Djawi* edisi Meinsma / ditranskrip, diterbitkan oleh W.L. Olthof (1941) ditulis bahwa Bahurekso diperintahkan dihukum mati oleh Sultan Agung karena tidak berhasil mengalahkan Batavia (Belanda). Berikut tertulis “..... Botjah Gandek, sira menyanga ing Djakarta, si Mandoera Redja timbalana

moelih lan sakantjane kabeh. Ki Toemenggoeng Baoe Rekso patenana ana ing dedalan, lan si Mandoeroredja ja patenana. Batange pendemen ana ing Kali Woengoe “ (Babad, 1941 : 138).

- b. H.J. de Graff menulis dari laporan J.P. Coen sendiri bahwa tanggal 21 Oktober 1628 Belanda menyerang balik pasukan Bahurekso dan berhasil membakar kemah mereka setelah pertempuran sengit. “ Diantara sekitar 200 musuh (orang Jawa) yang gugur terdapat pula Tumenggung Bahurekso dan puteranya “ (de Graff, 1990 : 153). Secara obyektif laporan Coen ini tentu lebih benar, karena dicatat di tempat kejadian dan dengan tanggal jelas.

Kiranya kesalahan mencatat pada *Babad Tanah Jawi* karena penulisan dilakukan puluhan tahun setelah peristiwanya terjadi. Beritanya dikacaukan dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Adipati Mandurareja dan Adipati Upasanta oleh Tumenggung Sura Agul-Agul atas nama Sultan karena “ tidak bertempur mati-matian “ (de Graff, 1990 : 154).

Kedua, mengenai lokasi ibukota Kendal. Tampaknya kesimpulan Rochani bahwa ibukota Kabupaten Kendal di Kaliwungu kemungkinan besar benar, antara lain mengingat berbagai petilasan (gapura Pungkuran, makam Sunan Katong dll.).

Namun masih perlu dilacak informasi lain. Antara lain laporan duta VOC ke Kraton Mataram, yaitu Rijklof van Goens (1619) dan Dr. de Haen (1622 - 1624). Mereka berangkat dari Batavia

naik kapal, mendarat di Tegal kemudian berjalan darat melalui Kendal kemudian ke selatan menuju Karta, ibukota Mataram. Apa kedudukan kota Kendal waktu itu perlu diteliti, karena mereka biasa mendeskripsikan segala yang mereka lihat dengan sangat rinci.

Ketiga, tentang awal pemerintahan Kabupaten Kendal, yang dapat dipakai sebagai Hari Jadi kabupaten.

Dalam tulisan A. Hamam Rochani, Tumenggung Bahurekso diangkat menjadi Adipati Kendal (Bupati Kendal) berkedudukan di Kaliwungu, pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 12 Rabiulawal / Maulud 1023 A.H. atau 8 September 1614 (A. Hamam Rochani, 2003 : 253). Tidak begitu jelas dari mana diperoleh hari, bulan, dan tahun tersebut. Dikemukakan tanggal yang sangat rinci biasa ditemukan dalam laporan-laporan Belanda, Inggris, Portugis, bahkan kadang-kadang dari prasasti Jawa Kuno. Sangat mungkin angka tahun mendekati kebenaran karena Sultan Agung dinobatkan pada tahun 1613. Satu catatan perlu dicermati, bahwa dalam catatan J.P. Coen yang mengunjungi Jepara, sebelum ia menjadi Gubernur Jendral pada tanggal 22 September 1613 mendengar bahwa ada seorang gubernur dari sebuah kota besar bernama Kendal. Dia menjabat kepala daerah pesisir dan menjadi komandan Angkatan Laut kerajaan Mataram (De Graff, 1990 : 24). Oleh karena itu, dapat diduga bahwa orang tersebut adalah Tumenggung Bahurekso. Jadi pada tahun 1613 sudah dapat diduga bahwa di Kendal sudah ada bupatinya yaitu Tumenggung Bahurekso.

Penentuan Hari Jadi.

Penentuan hari jadi suatu daerah di Jawa Tengah pernah mendapatkan momentumnya pada tahun 1990-an. Sejumlah Pemda berusaha menulis sejarah kota atau kabupatennya sebagai usaha untuk menentukan hari jadi. Salah satu peristiwa sejarah yang sering menjadi dasar penentuan hari jadi adalah heroisme tokoh, dan umumnya terkait dengan peperangan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada masa Pemerintahan Orde Baru, dominasi sejarah militer dalam pembelajaran sejarah di sekolah cukup kuat, terutama pada periode pendudukan Jepang hingga Orde Baru.

Seiring dengan perubahan pemerintahan dari masa pemerintahan Orde Baru ke zaman Reformasi, pemerintah daerah banyak yang menulis ulang sejarah dan hari jadinya. Ada berbagai alasan yang dikemukakan, dan salah satunya seperti yang terjadi di Kendal adalah mengganti momentum hari jadi yang didasarkan pada Penyerangan pasukan Bahurekso terhadap markas VOC di Batavia dengan peristiwa sejarah saat Bahurekso ditetapkan sebagai kepala daerah (Bupati). Peristiwa heroik ini mungkin tepat pada masa lalu, tetapi kurang tepat pada saat sekarang dan perlu dilakukan reinterpretasi.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan untuk menentukan hari jadi.

Wasino dan Cahyo B.U. (1995), menyebutkan adanya 6 kriteria, yaitu :

(1) mencerminkan citra keberadaan suatu daerah (kabupaten atau kota);

- (2) memiliki nilai kebanggaan terhadap bangsa Indonesia (termasuk daerah kota atau kabupatennya);
- (3) memiliki nilai edukatif;
- (4) dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis khususnya metode sejarah;
- (5) dapat diterima masyarakat pendukungnya; dan
- (6) merupakan berita tertua.

4. Pelacakan Catatan-catatan Sejarah Sebutan “ Bupati “ Kendal masa Pemerintahan Sultan Agung.

Berita pertama VOC tentang keberadaan bupati Kendal berasal dari tahun 1613. Disebutkan bahwa, Gubernur Jenderal Pieter Booth pada tanggal 22 September 1613 kapalnya berlabuh di Jepara. Disana bertemu dengan penguasa Jepara dan Kudus yang keduanya berada di bawah kekuasaan Mataram. Di sana ia bertemu dengan pejabat daerah yang ternyata Bupati Kendal. Dari bupati ini, pejabat VOC tersebut memperoleh informasi bahwa raja Mataram mempunyai maksud tertentu dengan orang-orang Kumpeni yang akan sangat menguntungkan. Gubernur Kendal ini dikenal sebagai tumenggung yang menjabat kepala daerah pesisir dan menjadi angkatan laut kerajaan Mataram (Coen, Bescheiden, jilid 1 : 24; De Graaf, 1990 : 24).

Hubungan dagang antara VOC dengan Mataram kian membaik. Hal ini ditandai dengan diijinkannya pembangunan pos perdagangan

VOC di Jepara. Untuk keperluan ini bupati Kendal mendapat perintah dari patih Mataram untuk menyediakan batu bata yang dapat digunakan untuk pembangunan pos perdagangan tersebut (Sarchiecke, 1957 ; 1900).

Sayang sekali dalam sumber tersebut tidak disebutkan nama dari bupati Kendal. Yang pasti, nama Bahurekso belum disebut-sebut dalam sumber Belanda pada tahun tersebut.

Penyebutan nama bupati di Kendal baru terlihat jelas pada tahun 1615. Dalam berita VOC disebutkan bahwa Andries Soury dari Banten dan kepala Loji yang baru di Jepara, Doenssen, yang telah kecewa berkali-kali atas terhambatnya pembangunan loji di Jepara sekali lagi berusaha menghubungi raja Mataram. Maka pergilah mereka ke Kalinyamat. Di sana mereka bertemu Bupati Kendal, namanya Kiai Sondana, seorang penguasa (Jonge, Opkomst, jilid IV : 30).

Dengan bupati ini mereka membicarakan kemungkinan perjalanan ke pedalaman Jawa untuk mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat oleh Komandan Van Suerc yang hanya sedikit sekali memberi jaminan dan tidak memiliki kekuatan. Selain itu beberapa hal dipandang merugikan kompeni. Akan tetapi peninjauan kontrak itu tidak dapat dilaksanakan karena menurut informasi bupati Kendal tersebut, Sultan Agung tidak berada di tempat, tetapi di Wirasaba bersama tentaranya (Graaf, 1990 : 56; Schriecke, 1957 : 191).

Nama Bahurekso muncul dalam berita tahun 1618. Dalam berita itu disebutkan bahwa Tumenggung Bahurekso dari Kendal menjadi juru bicara Sultan Agung kepada JP Coen tentang Peristiwa Jepara tanggal 8 Agustus 1618. Peristiwa Jepara adalah peristiwa penyerangan penduduk pribumi terhadap Loji Belanda. Peristiwa diawali dengan pemanggilan Van Eyndhoven dan Cornelis Van Maseyck oleh Koja Hulubalang, Gubernur Jepara. Belum lagi sempat duduk, mereka ditahan. Seluruh barang-barang kompeni harus diserahkan. Setelah itu, Gubernur Jepara segera memerintahkan penyerbuan ke loji Belanda di Jepara. Dalam kejadian ini, tiga orang tewas, tiga orang luka-luka, dan yang lain ditahan (De Jonge, Opkomst, jilid IV : 96 - 97).

Koja Hulubalang mengatakan bahwa tindakannya atas perintah raja, dan bila tidak dilaksanakan anak dan isterinya akan dibunuh. Alasan dari penyerangan ini adalah terjadinya perampasan kapal-kapal Jepara oleh orang-orang Belanda. Selain itu juga karena sikap Van Eyndhoven yang menyamakan raja Mataram dengan anjing yang memperlakukan gubernur dan kepala-kepala lainnya dengan tidak sopan (Graaf, 1990 : 60).

Sejalan makin tegangnya hubungan dagang antara Mataram dengan VOC yang telah berhasil mendirikan kantor dagangnya di Batavia, Bahurekso muncul sebagai diplomat Mataram yang penting. Pada tahun 1619, Bupati Kendal yang seorang Jawa terkemuka ini datang ke Batavia dengan membawa berita bahwa raja tidak berniat membunuh para tahanan Belanda, tidak juga membebaskan mereka dengan penggantian uang, kecuali jika diminta (Coen, Bescheiden, III : 560).

Sebagai jawaban atas kunjungan Bahurekso ini, Pemerintah tertinggi VOC mengirim utusan seorang juru bicara bernama Pedro. Hasilnya mengecewakan karena raja Mataram mengatakan agar VOC menyadari dulu kerugian yang diderita oleh raja Mataram akibat perbuatan orang-orang Belanda. Selain itu, Pedro diperlakukan tidak sopan oleh rakyat dari Tumenggung Bahurekso. Akibat tindakan itu, Coen menyatakan bahwa di Mataram terdapat kebencian terhadap orang-orang asing sehingga mereka tidak boleh menghadap rajanya.

Bahurekso merupakan orang kepercayaan Sultan Agung dalam menyelesaikan konflik-konflik antara pedagang VOC dengan penduduk pribumi. Ini terlihat dalam peristiwa perampasan kapal Belanda oleh armada-armada kapal Jawa pada malam hari di pelabuhan Jepara pada bulan September 1620. Dua kapal Belanda bermuatan beras dirampas. Kapal-kapal Belanda lain, anak buah kapalnya (ABK) dibunuh (Coen; Bescheiden , I. hlm. 596 - 597).

Artus Gijssels yang diangkat menjadi pimpinan komando kapal-kapal Amsterdam berusaha menemukan akar persoalan konflik tersebut. Kapal-kapal Belanda berusaha mendekati pantai Jepara di pagi harinya. Belum berhasil menemui penguasa setempat, ia telah bertemu dengan Saudagar Inggris, William Bennet yang datang di kapalnya. Bennet mengelabui Gijssels agar tidak membalas serangan dengan alasan sementara waktu telah tercapai perdamaian dengan Mataram. Gijssels yang percaya telah terjadi perdamaian membayar 200 rial kepada pemilik salah satu kapal yang dibakar oleh Belanda, dan tidak mengusik kapal-kapal lainnya. (Jadi Belanda bermaksud balas dendam, tetapi diredam oleh Bennet). Bahkan Gijssels menulis sepucuk surat kepada

kapal-kapal Belanda yang lewat bahwa telah terjadi perdamaian dengan Mataram. Penipuan ini akhirnya diketahui oleh JP Coen. Ia mengatakan bahwa Kompeni tidak hanya dirugikan, tetapi juga dinodai. Gijssels didenda 100 rial.

Peristiwa di Jepara disampaikan oleh Coen kepada raja Mataram. Raja Mataram memberikan jawaban bahwa raja tidak menghendaki perang, meskipun ia bersedia bertempur dengan orang Belanda. Wakil perdagangan Belanda di Jepara ditahan oleh pihak Mataram karena kesalahan sendiri. Jika tahanan itu diinginkan kembali, maka hendaknya Coen mengirim orang kepada Tumenggung Bahurekso dari Kendal untuk memintanya.

Surat Raja Mataram sampai di Batavia kemungkinan tanggal 20 September 1620. VOC memberikan jawaban bahwa ia juga ingin damai, dengan syarat bahwa orang-orangnya yang ditahan harus dikembalikan terlebih dahulu. Dalam surat itu diikuti ancaman bahwa jika tidak dikabulkan, VOC dapat berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap Raja Mataram (Coen, Bescheiden, III : 664).

Surat itu mendapat tanggapan. Para tahanan dipersilahkan datang dari Taji (pabean Mataram sebelah timur) ke kota istana, tetapi belum dibawa ke hadapan raja. Mereka harus berdiam satu mil dari keraton kemudian dibawa ke Tegal. Tumenggung setempat ditugasi untuk berunding. Dalam perundingan diajukan syarat-syarat oleh Belanda yaitu kedua belah pihak akan maaf memaafkan dan saling tukar tahanan. Raja menghendaki armada perang Mataram bebas melintasi Banten dan Surabaya. Kapal dagangnya bebas lintas

Malaka, Patani, dan Johor, Raja Mataram bahkan menawarkan jasa membantu kompeni jika VOC hendak menyerang Banten. Di Jepara dijanjikan sebuah loji baru. Koja Hulubang akan diganti oleh Tumenggung Bahurekso. Selanjutnya Bahurekso lah yang akan mengatur hubungan dengan orang-orang Belanda. Mereka selanjutnya dapat mengharapkan penjualan beras dan mrica dengan syarat membayar bea cukai. Tumenggung tidak meminta ganti rugi uang, tetapi Gubernur Jenderal VOC harus meminta maaf secara tertulis untuk kerugian yang ditimbulkan pihak Belanda kepada raja Mataram. Raja Mataram minta maaf kepada Gubernur Jenderal atas hal yang dilakukan oleh hulubalang, sebaliknya Belanda juga harus minta maaf kepada raja.

Pemerintah tertinggi Batavia kemudian mengutus Letnan A Caen ke Tegal. Di kota ini ia disambut dengan baik dan diberikan rumah yang layak, tetapi para tahanan tidak diperbolehkan menghadap. Lima orang tahanan yang masih ditahan diminta membayar kurang dari 5000 rial. Ini terlalu tinggi karena kumpeni masih memiliki 150 tahanan orang Mataram, semuanya abdi dalem Raja Mataram. Oleh karena Kumpeni memandang uang tebusan terlalu tinggi maka tak dihiraukan.

Akibat tidak adanya penyelesaian itu, maka kedua belah pihak melanjutkan perang. Dalam situasi permusuhan dengan kumpeni itu Tumenggung Bahurekso memberikan surat yang ditujukan kepada seorang kapten di Malaka. Surat yang dibawa oleh utusan Mataram itu isinya berupa larangan memasukkan beras oleh pihak Belanda yang sedang mendirikan kantor di Batavia. Tujuan Bahurekso adalah

untuk memancing serangan orang-orang Portugis terhadap Batavia (Coen, Bescheiden jilid 1 : 614). Surat itu jatuh ke tangan Kumpeni karena utusan Mataram yang menumpang kapal beras yang menuju Malaka ditahan Kumpeni. Bahurekso tidak peduli terhadap penahanan itu dan mengirim kembali 24 perahu beras ke Malaka.

Untuk meredakan ketegangan dengan pihak Kumpeni, pihak Mataram berusaha melepas tahanan Kumpeni. Tanggal 16 November 1621, para tahanan Belanda dibawa dari Jepara dan diserahkan kepada Kumpeni. Selain itu Tumenggung Tegal mengirim utusan-utusan dengan membawa 1000 gantang beras ke Batavia. Peristiwa ini dipahami sebagai jalan damai hubungan antara Mataram dengan VOC.

Sebagi pengukuhan hubungan baik antara keduanya, maka VOC membebaskan tahanan kawula Tumenggung Bahurekso. Selain itu juga dikirim hadiah-hadiah berharga berupa : sebutir intan diikat emas, 12 kain lakan merah, tiga potong surban sutra, sebuah senapan panjang dengan tali bahunya disepuh emas. Tumenggung Bahurekso sangat gembira atas hubungan damai ini. Dalam suratnya pada bulan Maret 1622 menyampaikan terima kasih atas dibebaskannya para tahanan tersebut serta hadiah-hadiah yang diterimanya (Graaf, 1990 : 73).

5. Peristiwa Bahurekso Saat Mengemban Tugas Penaklukan Daerah Lain dari Raja Mataram.

Pada tahun 1622, Mataram melakukan penyerangan ketiga kalinya ke wilayah Surabaya. Kantor dagang Belanda yang ada di Gresik

juga tidak luput dari perhatian Mataram. Tumenggung Bahurekso memperingatkan kepada Gubernur Jenderal VOC tentang bahaya yang muncul ketika Mataram menyerang wilayah Surabaya, sebab Jortan dan Gresik akan dihancurkan. Ancaman Bahurekso ini dimaksudkan agar orang-orang Belanda melepaskan kepentingan mereka di Jawa Timur dan tidak lagi mencampuri urusan Surabaya. (Jonge, Opkomst Jilid IV : 155; Graaf, 1990 : 83).

Penyerangan terhadap Madura dari pasukan Mataram berlangsung pada bulan Juli 1624. Tumenggung Bahurekso termasuk perwira militer yang turut dalam penyerangan ke wilayah seberang Jawa Timur tersebut. Dalam sebuah surat diceritakan bahwa di situ terjadi pertempuran hebat, tentara - tentara Mataram dapat masuk dalam kota. Raja Sampang tidak memberikan perlawanan dan menyerah begitu saja (Graaf, 1990 : 91).

Kekuasaan tertinggi di Mataram adalah raja. Raja adalah penguasa dunia dan sebagai wakil Tuhan di jagad raya sekaligus sebagai pemimpin agama (*Kalifatullah panatagama*). Begitu berkuasanya raja, sehingga ia menjadi pemilik tanah beserta isinya (termasuk kawulanya).

Raja tidak menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari secara langsung. Yang menjalankan pemerintahan secara langsung adalah patih. Patih di Mataram bergelar tumenggung. Patih ini berfungsi seperti perdana menteri dalam sistem kabinet parlementer. Di zaman pemerintahan Sultan Agung telah mengalami beberapa pergantian patih. Sampai dengan tahun 1615 adalah Kiai Surantani. Setelah itu digantikan oleh Tumenggung Singaranu (1651 - 1629).

Selain patih Mataram, di pemerintahan pusat terdapat sejumlah pejabat tinggi lain. Pada tahun 1615 dikenal pejabat ulama tertinggi (penasihat kerohanian), Quadi Fachruddin, yaitu Adipati Mandaraka. Pada tahun 1622, organisasi pemerintahan pusat Mataram lebih luas. Raja diceritakan dikelilingi oleh empat orang penasehat yang membawahi 500 orang kaya. Dua penasehat membawahi bagian kiri, dan dua lain membawahi bagian kanan. Penasehat kiri adalah Kiai Adipati Mandureja dan Adipati Upasanta. Penasehat bagian kanan adalah : Tumenggung Mangun Oneng dan Tumenggung Sujana Putra. Pada tahun 1624, penasehat raja menjadi enam, dua tambahan berikutnya adalah : Kiai Demang Sutaprana dan Tumenggung Indranata. Raja Mataram memiliki kekuasaan mutlak, namun dalam mengambil tindakan-tindakan penting dalam urusan kerajaan, ia meminta nasehat para pejabat kerajaan tersebut.

Selain pejabat tinggi dalam birokrasi, orang penting di bawah raja adalah keluarga kerabat raja yang pada masa akhir pemerintahan Sultan Agung dikenal dengan nama Pangeran. Mereka antara lain Kiai Adipati Ing Juminah, Puger, dan Purbaya.

Disamping para pejabat teras penasehat raja dan pangeran, masih terdapat satu golongan lagi yaitu pejabat setempat (kepala daerah). Mereka pejabat gubernur yang menguasai suatu wilayah, antara lain Gubernur Kendal, Tegal, dan Jepara yang berkuasa di pesisir utara. Bahurekso adalah salah satu kepala daerah pesisir utara, wakil kerajaan Mataram Islam yang memiliki kewajiban mengatur wilayah yang diberikannya. Bahurekso dan kepala daerah lain juga wajib ikut sendiri bersama pasukannya ke medan perang

jika Mataram memerlukannya. Penguasa daerah ini juga wajib menyelenggarakan peradilan tingkat rendah. Pada saat Garebeg Maulud (puncaknya tanggal 12 Maulud) mereka harus menghadap ke istana dengan membawa upeti berupa hasil bumi dan sumbangan lain yang diperlukan oleh raja.

Berbeda dengan pejabat kerajaan yang tinggal di lingkungan keraton, para kepala daerah (termasuk Bahurekso) dalam tatanan pemerintahan Mataram memiliki kebebasan (“ otonomi luas “) untuk mengatur pemerintahan dan rakyat di wilayahnya. Penguasa Kendal dapat memungut pajak kepada para pedagang asing yang melalui pelabuhan Kendal, bahkan melakukan tindakan hukum. Diceritakan bahwa Tumenggung Bahurekso pernah berhasil merampas 14 kapal, dan hulubalang Kendal berhasil merampas 2 kapal asing.

Meskipun demikian, jika tindakan daerah terlalu berlebihan, dan raja Mataram mengetahuinya, maka hukuman dapat dijatuhkan. Hal ini sebagaimana pernah terjadi Raja Mataram memenggal kepala beberapa orang terkemuka di Kendal karena keterlaluhan dalam kasus perampasan kapal. Tujuan raja Mataram adalah agar pejabat-pejabat daerah gentar untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum (Graaf, 1990 : 122).

Peranan Bahurekso dalam Pengepungan Batavia.

Hubungan diplomatik antara Mataram dan VOC ternyata tidak bisa dipertahankan. Perang merupakan pilihan terakhir dari pihak Mataram, Mataram berusaha menggempur markas VOC di Batavia pada tahun 1628. Sebagai pertanda akan adanya peperangan itu,

Tumenggung Bahurekso memerintahkan penutupan hampir seluruh pantai utara Jawa dari kegiatan perdagangan asing. Akibat penutupan ini, maka semua orang asing yang akan datang ke istana ditahan di kota-kota pelabuhan. Bahkan kantor dagang Inggris di Jepara juga ditutup. Dalam penyerangan terhadap VOC itu, Bahurekso berperan sebagai panglima tertinggi armada Jawa. (Coen, Bescheiden, VI : 414; Graaf ; 1990 : 151).

Tumenggung Bahurekso wafat dalam serangan tahun 1628 bersama putranya, akibat dibakarnya kemah pasukan oleh Pasukan Kumpeni (Graaf, 1990 : 153).

7. Penetapan Kembali Momentum Hari Jadi Kabupaten Kendal.

Hari Jadi Kabupaten Kendal telah ditetapkan dengan memilih tokoh legendaris, yaitu Tumenggung Bahurekso. Tokoh ini memang memiliki banyak relevansi dengan beberapa kriteria yang diajukan tersebut. Tumenggung Bahurekso merupakan tokoh yang merepresentasikan keberadaan daerah kabupaten Kendal, ia merupakan Kepala Daerah Kendal yang memerintah pada masa pemerintahan Sultan Agung Anyakrakusuma dari Mataram. Tokoh ini tidak diragukan lagi memiliki jiwa patriotisme yang tinggi sehingga menimbulkan kebanggaan bagi rakyat Kendal, bahkan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Bahurekso merupakan kepala daerah dan sekaligus sebagai pimpinan tertinggi angkatan laut negara Mataram Islam. Perjuangan Bahurekso patut dicontoh karena merupakan tokoh yang pantang menyerah, taat pada atasan, dan cinta tanah air, sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakat Kendal khususnya, dan

Indonesia pada umumnya. Tokoh ini bukan merupakan tokoh fiktif, tetapi benar-benar merupakan tokoh historis, benar-benar ada dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari sumber-sumber yang memberitakan tentang keberadaan tokoh ini, baik dari sumber lokal maupun sumber Barat (terutama VOC). Kehadiran tokoh ini sangat diterima dalam hati sanubari rakyat Kendal, hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam merayakan hari jadi maupun peringatan kolektif masyarakat yang diwujudkan dalam cerita tutur lokal di Kendal.

Persoalan yang muncul kini adalah bagaimana menentukan momentum yang tepat untuk dijadikan hari jadi. Oleh karena ini merupakan hari jadi kabupaten, maka penentuan hari jadi memang lebih tepat jika saat pengangkatan pertama Bahurekso sebagai kepala daerah di Kendal dengan gelar Tumenggung. Pelacakan ini diperlukan untuk menggantikan momentum hari jadi yang didasarkan pada penyerangan Bahurekso ke Batavia yang berakhir dengan gugurnya tokoh tersebut.

Menentukan pengangkatan pejabat di zaman sebelum masuknya birokrasi Kolonial Belanda di Indonesia bukan suatu barang yang mudah. *Pertama*, ia tidak jelas apakah tradisi pengangkatan diikuti dengan “ surat kekancingan “, sebab konsep ini lebih banyak dipengaruhi oleh Belanda dengan nama Surat Keputusan Pengangkatan (SK Pengangkatan). *Kedua*, persoalan tradisi pengarsipan atau penyimpanan dokumen yang tidak baik, sehingga dokumen tersebut tidak sampai pada generasi berikutnya. Dengan demikian untuk mencari SK pengangkatan Bahurekso menjadi Bupati Kendal pertama kali ibarat mengharapkan datangnya hujan di musim kemarau.

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk melacak peristiwa pengangkatan Tumenggung Bahurekso menjadi Bupati Kendal (Kepala Daerah Kendal) adalah dengan membandingkan catatan sejarah yang tertinggal tentang awal disebutnya Tumenggung Bahurekso dengan tradisi pengangkatan pejabat tinggi di Mataram. Berdasarkan paparan data yang saya kemukakan di atas, bahwa sampai dengan tahun 1615, nama Bahurekso sebagai penguasa daerah Kendal belum muncul, Ketika itu nama penguasa daerah Kendal adalah **Kiai Sondana**. Nama Bahurekso baru muncul dalam berita Belanda tahun 1618. Dalam berita itu disebutkan bahwa Tumenggung Bahurekso dari Kendal menjadi juru bicara Sultan Agung kepada J.P. Coen tentang Peristiwa Jepara tanggal 8 Agustus 1618. Dengan demikian, pengangkatan Tumenggung Bahurekso sebagai penguasa Kendal dapat dilacak antara tahun 1615 sampai dengan tahun 1618. Tahun 1615 harus dilacak setelah bulan Juli karena dalam bulan tersebut Penguasa Kendal masih disebut sebagai Kyai Sondana. Sementara itu untuk tahun 1618 harus dicari sebelum tanggal 8 Agustus 1618, karena pada saat tersebut nama Tumenggung Bahurekso dari Kendal telah disebut menjadi juru bicara Sultan Agung kepada J.P. Coen tentang Peristiwa Jepara tersebut.

Dalam tradisi kerajaan Islam Jawa pengangkatan pejabat tinggi mengikuti hari pisowanan agung kerajaan. Di Demak, pisowanan besar terjadi pada tanggal 10 Besar (Dzulhijjah) setiap tahunnya. Sementara itu di bekas Kerajaan Mataram Islam, di Surakarta dan Yogyakarta adalah setiap tanggal 12 Rabiul Awal (12 Maulud). Dengan demikian, pelacakan hari pengangkatan Bahurekso sebagai “ Gubernur “ Kendal dapat dirunut dengan tradisi ini.

Kesimpulan Tim Perumus Peninjauan Kembali Hari Jadi Kabupaten Kendal.

Hari jadi suatu daerah dapat dimaknai sebagai hari yang dipandang menentukan dalam sejarah perkembangan daerah tersebut di masa lampau. Hari yang menentukan tersebut antara lain bisa berupa saat terbentuknya suatu daerah administratif, heroisme tokoh, dan sebagainya. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan untuk menentukan hari jadi, yaitu : (1) mencerminkan citra keberadaan suatu daerah (kabupaten atau kota); (2) memiliki nilai kebanggaan terhadap bangsa Indonesia (termasuk daerah kota atau kabupatennya); (3) memiliki nilai edukatif; (4) dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis khususnya metode sejarah; (5) dapat diterima masyarakat pendukungnya; dan (6) merupakan berita tertua.

Penentuan hari jadi ditentukan oleh dua hal, yaitu penelitian ilmiah kesejarahan dan keinginan masyarakat pendukungnya. Penelitian ilmiah kesejarahan artinya bahwa momen yang dijadikan hari jadi benar-benar peristiwa sejarah, yang didasarkan pada hasil riset akademik di bidang sejarah. Sementara itu yang dimaksud dengan keinginan masyarakat pendukungnya adalah bahwa momen sejarah yang dipilih tersebut benar-benar diinginkan sebagai simbol dan citra keberadaan daerah tersebut.

Momen kesejarahan dari suatu daerah suatu ketika dapat berubah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu temuan baru fakta-fakta sejarah dan perubahan sosial dan politik daerah tertentu yang menghendaki perubahan. Kecenderungan ini secara ilmiah dapat diterima karena karya sejarah merupakan produk zamannya, sehingga

setiap generasi dapat memilih momen sejarahnya tersendiri sebagai simbol atau citra daerahnya.

Kabupaten Kendal pada saat ini hendak mengganti momen-tum hari jadi yang semula didasarkan pada Penyerangan pasukan Bahurekso terhadap markas VOC di Batavia pada tanggal 28 Agustus 1628 dengan momentum pengangkatan Bahurekso menjadi Bupati atau Kepala Daerah Kendal. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan efek psikologis, yakni kegagalan tokoh dalam peperangan yang berakibat wafatnya tokoh tersebut di Batavia. Selain itu secara rasional peristiwa heroik tersebut kurang tepat jika dijadikan sebagai pertanda awal mula munculnya Kabupaten Kendal. Yang lebih tepat hari jadi Kabupaten memang momen ketika Bahurekso diangkat sebagai Bupati atau Kepala Daerah Kendal.

Hasil seminar yang diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2006 dengan pembicara Prof. Dr. Djuliaty Soeroyo, Dr. Wasino, M. Hum., dan H. Moenadi menyepakati bahwa momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal sebagai Hari Jadi Kabupaten Kendal. Para pembicara juga sepakat bahwa pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal mengikuti tradisi pengangkatan pejabat tinggi Kerajaan Mataram Islam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi mereka belum menyepakati tahun pengangkatannya. Untuk menindaklanjuti kegiatan seminar tersebut dibentuklah tim perumus yang terdiri dari para pembicara, moderator, anggota DPRD, dan Pejabat Kabupaten Kendal. Salah satu saran yang diajukan adalah perlunya penelitian lebih mendalam di Jakarta dan Yogyakarta untuk memastikan tahun terjadinya pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal.

Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam

melalui penelitian sumber-sumber Belanda serta Babad di Jakarta dan Jogjakarta oleh *Tim Perumus* Peninjauan Kembali Momentum Peristiwa Sejarah Perjalanan Hidup Tumenggung Bahurekso sebagai Titik Tolak Penentuan Hari Jadi Kabupaten Kendal menyimpulkan bahwa pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal adalah tanggal 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605 M. Tanggal tersebut bertepatan dengan *Hari Kamis Legi* malam Jumat Pahing tahun 1527 Caka.

Kesimpulan itu didasarkan pada data-data sebagai berikut :

1. Berita pertama VOC tentang keberadaan Bupati Kendal berasal dari tahun 1612, yakni catatan J.P. Coen (1919-1923 : 615). Catatan tertanggal 8 Januari tahun 1612 tersebut telah menyebut dengan jelas tentang posisi Bahurekso sebagai Bupati Kendal. Dalam laporan itu dikatakan bahwa “Tumenggung Bahurekso kepala daerah Kendal atas nama raja Mataram telah memerintahkan untuk mengajukan surat bebas jalan kepada VOC bagi jung-jung dengan muatan beras yang ingin berlayar ke Malaka”. Dengan demikian maka pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal pasti sebelum tahun tersebut.
2. Berita selanjutnya berasal dari tahun 1613. Disebutkan bahwa, Gubernur Jenderal Pieter Booth pada tanggal 22 September 1613 kapalnya berlabuh di Jepara. Di sana bertemu dengan penguasa Jepara dan Kudus yang keduanya berada di bawah kekuasaan Mataram. Di sana ia bertemu dengan pejabat daerah yang ternyata Bupati Kendal. Dari bupati ini, pejabat VOC tersebut memperoleh informasi bahwa raja Mataram mempunyai maksud tertentu dengan orang-orang Kumpeni yang akan sangat

menguntungkan. Gubernur Kendal ini di Kendal sebagai tumenggung yang menjabat kepala daerah pesisir dan menjadi laksamana angkatan laut kerajaan Mataram (Coen, Bescheiden, Jilid I : 24; De Graaf, 1990 : 24).

3. Setelah Kesultanan Demak dihancurkan oleh pasukan Panembahan Senopati (1588), berarti wilayah Demak dan wilayah kekuasaannya termasuk Kendal berada di bawah supremasi Mataram. Hal ini berlangsung juga setelah Senapati wafat dan digantikan putranya, Mas Jolang (Panembahan Seda Krapyak). Pada masa itu berdasarkan sumber-sumber babad, daerah Kendal belum merupakan sebuah Kabupaten.
4. Pada tahun 1602, Raden Mas Jolang mengangkat saudara tua dari ibu selir yang bernama Pangeran Puger menjadi Adipati Demak (De Graaf, 1990 : 3). Kekuasaan Puger meliputi wilayah Pantai Utara sebelah utara Gunung Kendeng, dari Jepara hingga Kendal (Babad Tanah Jawi, edisi Meinsma : 114).
5. Semasa Demak di bawah Puger, dan Mataram di bawah Jolang, hubungan antara Demak dan Mataram sering diwarnai konflik. Puncak ketegangan adalah terjadinya serangan Mataram terhadap Demak pada tahun 1605 (Coen, 1919-1923 : 209). Ketegangan baru berhasil mereda setelah pada tahun 1605 Pangeran Puger ditangkap dan dihukum buang ke Kudus (Babad Jawi, Meinsma : 115; Graaf, 1990 : 5). Sejak itu posisi Demak sebagai pusat kekuasaan Mataram di pantai utara Jawa bagian barat menjadi hilang.
6. Setelah jatuhnya Demak tahun 1605, Mataram berkepentingan

untuk menempatkan orang kuat dan loyal sebagai wakil Mataram di wilayah Pesisir utara termasuk Kendal. Sementara sumber VOC menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Januari 1612 Bahurekso sudah menjabat sebagai Bupati Kendal bergelar Tumenggung.

Berdasarkan berita tahun 1605 tentang jatuhnya Demak dan berita tahun 1612 tentang adanya Kepala Daerah Kendal bernama Bahurekso, serta pentingnya Mataram untuk menegakkan kekuasaannya di pantai utara Jawa tersebut, maka dapat diajukan hipotesis bahwa Pengangkatan Bupati Kendal diperkirakan setelah jatuhnya Demak dan dibuangnya pangeran Puger, penguasa Demak pada tahun 1605.

3. Menurut tradisi Kerajaan Mataram, pengangkatan pejabat secara resmi dilakukan bertepatan dengan upacara Garebeg Maulud tanggal 12 Rabiul Awal (12 Maulud) tahun Hijrah. Pengangkatan tersebut dapat dikonversi menjadi 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605 M. Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Kamis Legi malam Jumat Pahing tahun 1527 Caka.

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

ACUAN PUSTAKA

- Achmad Hamam Rochani, *Babad Tanah Kendal*, Semarang : Intermedia Paramadina, 2003.
- Boomgard, *Children of the Colonial State : Population Growth and Economic Development in Java, 1795 - 1880*, Amsterdam : fre University Press.
- Coen, J.Pzn, *Bescheiden Omtrent Zijn Bedrijfin Indie*, Den Haag, 119 - 1952 (tujuh jilid).
- Graaf, H.J. de. *Puncak Kekuasaan Mataram*, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- , dan Pigeaud, Th. G. Th., *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Jakarta: Grafitipers, 1985.
- , *Awal Kebangkitan Mataram : Masa Pemerintahan Senapati*, Jakarta : Grafitipers, 1987.
- Jonge, J.K.J. de, 1862 - 1875, *De Opkomst van het Nederlandsche Gezag in Oost Indie*, Den Haag (sembilan jilid).
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Khusus Bab III. " Sekali Lagi Pemikiran Sekitar Sejarah Nasional ". Jakarta : Gramedia, 1982.
- Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, *Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal*.
- Meinsma (ed.), *Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi*

Adam Doemoegi ing Taoen 1647 s, Gravenhage, 1941 *Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Taoen 1647*, Edisi W. L. Olthof s Gravenhage; M. Nijhoff, 1941.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, *Hari Jadi Kabupaten Kendal 26 Agustus 1628*, Risalah Singkat Seminar Hari Jadi, 1989.

Schriecke, 1957, *Indonesian Sociological Studies (Part Two)*, The Hague dan Bandung : W. Van Hoeve Ltd.

Soenarko, H. Pospito, *Babad Sultan Agung*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.

Wasino dan Cahyo Budi Utomo, 1995, *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Tegal*, Bapeda Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.